

## MEMBANGUN MANUSIA INDONESIA MELALUI PENDIDIKAN NILAI PANCASILA

**Budhy Munawar-Rachman**

*“Aku ingin membentuk suatu wadah yang tidak retak, yang utuh, yang mau menerima semua masyarakat Indonesia yang beraneka itu dan yang masyarakat Indonesia mau duduk pula di dalamnya, yang diterima oleh saudara-saudara beragama Islam, yang beragama Kristen, Katolik, yang beragama Kristen protestan, yang beragama Hindu Bali, dan saudara-saudara agama lain, yang bisa diterima oleh saudara-saudara yang adat istiadatnya begitu, dan yang bisa diterima oleh sekalian Saudara”.*

**Soekarno**, September 1955

Menurut Yudi Latif, “Problem Pancasila adalah terlalu surplus ucapan dan terlalu minus tindakan, dan inilah yang menimbulkan keraguan banyak orang akan ‘kesaktian nilai-nilai Pancasila dalam kenyataan hidup sehari-hari’.<sup>1</sup> Maka menjawab keprihatinan ini, lahirlah dua bukunya, *pertama* buku *Negara Paripurna* (2012) yang diniatkan sebagai paradigma pengetahuan, yang tak sekadar ucapan biasa namun distrukturkan dalam kerangka ilmu, diposisikan dalam pertarungan pemikiran dan ideologi dunia yang terus relevan; *Kedua*, *Mata Air Keteladanan* (2014)<sup>2</sup>, satu buku sumber teladan yang lebih afektif dan konatif. Uraian tentang Pancasila di bawah ini didasarkan pada kedua buku Yudi Latif ini, yang bisa disebut sebagai dua buku terbaik yang saling berkaitan tentang Pancasila.

Dua buku ini dapat disebut setangkup, yang satu menekankan aspek presisi melalui pendekatan kognitif, sementara yang kedua menekankan aspek impresi (kesan yang menggugah penghayatan dan pengamalan). Buku *Negara Paripurna* mendorong rasa bangga dan percaya diri bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara yang dibuat terburu-buru, asal ada, melainkan sejenis “jalan ketiga-yang-menyelamatkan” di antara kemajemukan pemikiran, ideologi, dan kepentingan. Sementara buku kedua menegaskan Pancasila sebagai sumber nilai yang melahirkan karakter Pancasila, yaitu karakter manusia Indonesia. Untuk merancang buku kedua ini, Yudi meyakini prinsip yang sama dengan prinsip utama Pendidikan Nilai Pancasila (PNP) bahwa *moral is not taught but caught*. “Nilai-nilai keteladanan dan kepahlawanan tidaklah diajarkan (*taught*) secara

---

<sup>1</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2012), h. xvii. Selanjutnya disebut *Negara Paripurna* saja.

<sup>2</sup> Latif, Yudi, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan* (Mizan: Bandung, 2014). Selanjutnya disebut *Mata Air Keteladanan* saja

kognitif lewat hafalan dan ‘pilihan ganda’ melainkan ditangkap (*caught*) lewat penghayatan emotif”<sup>3</sup>.

Maka pada buku kedua, Yudi Latif menurunkan nilai-nilai dari kelima sila, seraya menunjukkan hidupnya nilai-nilai tersebut melalui kisah para tokoh *founding father* dan *founding mother*<sup>4</sup>. Yudi ingin menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan produk gagasan, yang hanya benar dalam dunia ide, melainkan saripati nilai dari perilaku para pendiri bangsa. Nilai-nilai yang diajukan Yudi Latif bukan seperti 36 butir atau 45 butir Pancasila pada Orde Baru, yang terlihat sempurna namun rapuh dalam implementasinya. Memang demikian, resiko dari perumusan nilai yang didasarkan pada gagasan, ia kehilangan jangkar di tengah lautan yang membuatnya terapung-apung atau hilang ditelan badai.

### Merumuskan Nilai-Nilai Pancasila

Yudi Latif merumuskan nilai-nilai yang dimiliki Pancasila. Ia misalnya, memeras masing-masing dari kelima sila menjadi 1 nilai utama: (1) sila pertama menjadi “Ketuhanan”; (2) sila kedua menjadi “Kemanusiaan”; (3) sila ketiga menjadi “Persatuan”, (4) sila keempat menjadi “Kerakyatan”, dan (5) sila kelima menjadi “Keadilan”.

Dari lima nilai hasil perasan lima Sila ini, Yudi Latif kemudian merumuskan 20 nilai, 1 sila diturunkan menjadi 4 (empat) nilai. Keempat nilai ini, tidak dirumuskan berdasarkan kata atau istilah yang ditemukan dari kalimat-kalimat lima sila. Nilai-nilai itu dirumuskan berdasarkan pemikiran dan laku teladan dari para *founding fathers*, *founding mother*, (dan guru Bangsa ini). Pilihan produksi nilai ini menunjukkan bahwa nilai itu “sudah ada” dalam perilaku Manusia Indonesia, ia tinggal dipupuk, diarusutamakan, sehingga tumbuh menjadi nilai bersama seraya menghasilkan kehidupan sebagaimana dicita-citakan Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan Yudi Latif dapat dilihat pada tabel berikut:

SILA	NILAI PANCASILA	TOKOH KETELADANAN
1. Ketuhanan Yang Maha Esa	1) Berketuhanan	Hamka; H. Agoes Salim; Mohammad Hatta; Ni Wayan Gedong; Soekarno.
	2) Berketuhanan yang Welas Asih dan Toleran	Gus Dur; Sayyid Shah Muhammad Al-Jaeni; R. A. Kartini; K.H. Ahmad Dahlan; K. H. Hasjim Asy’ari; Pastor Van Lith; Y.B. Mangunwijaya, dll.
	3) Berani Memperjuangkan Kebenaran dan Keadilan	Soedirman, Bung Tomo; K.H. Idham Chalid; Walter Mongonsidi; J. Leimena; Romo. V. Kirjito; S. Ali Al-Habsyi.
	4) Berbuat baik dengan Amanah, jujur, Bersih	H.O.S. Tjokroaminoto; Hatta; Sjarifuddin Prawira-negara; Natsir.
	5) Memperjuangkan kemerdekaan dan	Soekarno; Hatta; Zein Hassan; Sjahrir; Suwandi; Abdul Karim;

<sup>3</sup> Latif, Yudi *Mata Air Keteladanan...*, h. xvi.

<sup>4</sup> Istilah yang dikenalkan kemudian sebagai bentuk adanya partisipasi perempuan di masa kemerdekaan.

<b>2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab</b>	Kedaulatan Bangsa di Pentas Dunia	Sudarsono; Agoes Salim; Djuanda Kartawidjaja; Mochtar Kusumaatmadja.
	6) Memperjuangkan Kemerdekaan dan Perdamaian Dunia	Hatta; Bung Karno; Sjahriri, Imam Mahmud Rais Abin.
	7) Memuliakan Hak Asasi Manusia	R.M. Surjoprayotno. Tan Malaka; Soekarno; Agus Salim; Hatta; Mohammad Yamin; Yap Thian Hien; Haji Johannes Cornelis (HJC) Princen; Munir); Gus Dur; Sjahrir.
<b>3. Persatuan Indonesia</b>	8) Menegakkan Keadilan sebagai perlindungan HAM	Hoegeng Imam Santoso; Royadin; Baharuddin Lopa; Raden Soelaeman Koesoemah Atmadja; Albertina Ho; B.J. Habibie .
	9) Menunjukkan Rasa Memiliki dan Mencintai Tanah Air	HOS. Tjokroaminoto; Siti Soendari; Sri Sultan Hamengkubuwono IX; Tjipto Mangoenkoesoemo; Soetomo; Ernest; Ki. Hadjar Dewantara; Laksamana Muda John Lee (Jahja Daniel Dharma); Abdurrahman Baswedan.
	10) Menjalin Persatuan dalam Keragaman	Soekarno; Hatta; Sjahrir; Sjarifuddin; Sofyan Tan.
	11) Mengembangkan Gotong Royong dan Kekeluargaan	Soekarno; Sri Sultan Hamengkubuwono IX; Soedirman; Ki Hadjar Dewantara; Ki Bagoes Hadikoesoemo; Sukiman Wirjosandjojo; Wahid Hasjim; I.J Kasimo; Soeharto; Ali Sadikin; Ibrahim Adji; M. Enoch; Muhammad Hatta; Agoes Salim; Sutan Sjahrir; Tan Malaka; Muhammad Yamin; Mohamad Natsir; Simatupang; Nasution; Kawilarang; A.A. Maramis; Muhammad Yusuf; Mr. Assat; Teuku M. Hassan; A. R. Baswedan; Mak Eroh; Daeng Sutigna, Ujo Ngalegana.
	12) Mengutamakan Kepentingan Umum dengan Rela Berkorban	Bung Karno; Chairil Anwar; Sri Sultan Hamengkubuwono IX; Teuku Hamud Azwar; Syamaun Gaharu; Sultan Syarif Qasim II,; K.H. Hasjim Asy'ari; Haji Bilal; Arif; M. Husni Thamrin; Rahmi Hatta; Siswanto.
<b>4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah/Kebijaksanaan</b>	13) Menjunjung Daulat Rakyat	H.O.S. Tjokroaminoto; Ki Hadjar; Tan Malaka; Soekarno; Hatta; Sutan Sjahrir, Muhammad Yamin; Woerjaningrat; Soesanto Tirtoprodjo, Ki Bagoes

<p>dalam Permusyawaratan/ Perwakilan</p> <p>5. Keadilan Sosial bagi Rakyat Indonesia</p>		Hadikoesoemo , Soekarni;; Dewi Sartika; Emmy Saelan
	14) Memuliakan Permusyawaratan Perwakilan	Soekarno; Hatta; Nicolaus Driyarkara .
	15) Memimpin dengan Hikmah-Kebijaksanaan	H.O.S. Tjokroaminoto; M. Natsir; Soekarno; Hatta, Ki. Hadjar, Megawati Soekarnoputri .
	16) Menunjukkan Pertanggungjawaban Publik	Hatta, Joko Widodo; Tri Rismaharani; K.H. Musthofa Bisri.
	17) Memajukan Kesejahteraan umum	Soekarno; Mohammad Yamin; Soerio; A. Rachim Pratalykrama; Abdul Kadir; Ki Bagus Hadikoesoemo, Hatta; R. Ng. Aria Wiriatmadja; K.H. Hasjim Asy'ari; I.J. Kasimo.
	18) Menyelenggarakan Jaminan Pelayanan Sosial	Tirto Adi Surjo; Tjipto Mangoenkoesoemo; Ernest Douwes Dekker; Ki Hadjar Dewantara, Oen Boen Ing.
	19) Mencerdaskan Kehidupan Bangsa	Ki Hadjar Dewantara; R.A. Kartini; Dewi Sartika; Roehana Koeddoes; Maria Walanda-Maramis); Soekarno; La Ode Manarfa.
20) Pembangunan berkelanjutan untuk Keadilan dan Perdamaian	Tan Malaka, Bung Hatta; Roesman Anwar; Soekarno; Mar'ie Muhammad, Yosepha Alomang.	

Dalam buku ini Yudi Latif sedemikian sabar mengurai kisah teladan satu tokoh ke tokoh yang lain, untuk membuktikan bahwa nilai dalam Pancasila bukan isapan jempol belaka, “sudah hidup” dan sekaligus “menunggu untuk dihidupkan kembali” pada masa kini dan ke depan. Sementara pada buku pertama, *Negara Paripurna*, Yudi Latif menunjukkan bukti bahwa gagasan Pancasila adalah gagasan besar di hadapan modernisme saat itu dan tetap bisa dijadikan pijakan untuk menanggapi tantangan zaman kini. Dua buku ini, seperti dua sisi mata pisau, dua-duanya sama tajam dan mengarah pada sisi yang sangat penting: gagasan dan nilai.

Yudi Latif telah membuka kembali Pancasila sebagai wacana terbuka. Ia telah meletakkan Pancasila dalam kancah wacana, juga dalam kisah sosok historis para guru bangsa. Yudi Latif misalnya, menunjukkan bahwa “dalam usaha membumikan Pancasila dari alam idealitas menuju alam realitas, kita perlu menghayati fitrah (semangat asal) bernegara seperti yang dipesankan dan dicontohkan oleh para pendiri bangsa sendiri”<sup>5</sup>.

Setidaknya bagi Yudi Latif, ada 8 fitrah pendiri bangsa dalam mewujudkan Manusia Indonesia, yakni Ketuhanan, Kekeluargaan, Ikhlas, Pengabdian, Menghasilkan yang Terbaik, Keadilan dan Kemanusiaan, Semangat Juang, dan Fitrah Batin. Cara penghayatan Yudi Latif menghasilkan kedua buku ini, tentu saja bagi subyek lain dengan

<sup>5</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, h. 610.

model penghayatan yang berbeda akan menghasilkan tafsir yang berbeda pula. Tulisan ini ingin mengeksplorasinya untuk mendapatkan model Manusia Indonesia, yang adalah Manusia Pancasila.

### **Menghidupkan Nilai Pancasila**

Dalam kerangka Pendidikan Nilai Pancasila, sebagai metode mewujudkan Manusia Indonesia, buku Yudi Latif yang kedua tentu lebih bisa dijadikan pijakan pengembangannya. Di samping, sejak awal buku tersebut mendasari prinsip nilai sebagai “yang dilihat” bukan “yang diajarkan/digagaskan”, serta memiliki prinsip dasar “semua manusia memiliki nilai dan harga dirinya” yang menunggu “dilahirkan”. Dengan kata lain, nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila didekati dengan metode menghidupkan nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dirumuskan ke dalam satu kata yang konseptual bukan dalam bentuk kalimat. Kelima sila dirumuskan ulang kembali menjadi konsep-konsep nilai universal yang mampu dihidmati oleh seluruh individu warga Negara Indonesia, yang bisa diurai ringkas sebagai berikut:

#### **Sila Pertama**

Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, misalnya, telah diturunkan oleh Yudi Latif (dengan merujuk pada Soekarno) sebagai “Ketuhanan yang Berkebudayaan” kemudian disarikan lagi menjadi “Ketuhanan”, diterjemahkan menjadi 4 nilai, yakni:

- 1) Berketuhanan,
- 2) Berketuhanan yang Welas Asih dan Toleran,
- 3) Berani Memperjuangkan Kebenaran dan Keadilan, dan
- 4) Berbuat baik dengan Amanah, jujur, Bersih.

Secara sederhana pada gagasan Yudi tersebut, terdapat beberapa nilai yang bisa disebutkan dengan nilai-nilai yang lebih universal, seperti beriman, welas asih, toleran, berbakti (bertindak baik demi nilai mulia), amanah, jujur, dan bersih. Dari nilai-nilai inilah kemudian Pendidikan Nilai Pancasila berpijak, sehingga seluruh metode dan atau pendekatannya untuk membangun model Manusia Indonesia, seperti pengembangan kesadaran nilai, merancang mimpi masa depan, keterampilan berbasis nilai, dan sebagainya diterapkan dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila tersebut.

Maka, perlu dirumuskan terlebih dahulu nilai dari masing-masing sila. Sebagai contoh, berikut ini dikemukakan prinsip, nilai, dan keteladanan dari Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila pertama adalah sila yang paling hangat dibicarakan sampai saat ini. Pangkalnya bermula dari konsep pemisahan atau penyatuan antara agama dan Negara. Sejak perumusan dasar Negara, perdebatan itu muncul. Yudi Latif menceritakan perdebatan itu dengan komprehensif pada buku *Negara Paripurna*, tak ada satupun yang tidak mau berlandaskan ketuhanan, bahkan Tan Malaka (sebagai wakil dari Partai Komunis mensyaratkan perlunya agama atau Ketuhanan sebagai basis pergerakan). Jauh-jauh hari, pada tahun 1928, para jenius bangsa telah mengemukakan kerumitan hubungan antara agama dan Negara ini, Soekarno dan Agus Salim pernah menulis gagasan ini.

“Nasionalisme kita adalah Nasionalisme ketimuran dan sekali-kali bukanlah Nasionalisme kebaratan yang menurut perkataan CR Das adalah suatu

Nasionalisme yang menyerang-nyerang, suatu Nasionalisme yang mengejar keperluannya sendiri. Suatu nasionalisme perdagangan yang untung rugi. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang membuat kita menjadi “perkaknya Tuhan” dan membuat kita hidup dalam roh”, (Soekarno, *Suluh Indonesia*, 12 Agustus 1928).

Soekarno menegaskan Tuhan harus tetap ada dalam nasionalisme (sebagai bentuk negara yang tidak berdasarkan agama), nasionalisme Indonesia harus menjadi “perkaknya Tuhan” yang “hidup dalam roh”. Hal serupa dikemukakan oleh Agus Salim:

“Sebab benda dan rupa dunia habis gunanya, apabila nyawa sudah tiada. Maka sebagai dalam tiap-tiap hal yang mengenai dunia kita, demikian juga dalam cinta tanah air, kita mesti menunjukkan cita-cita yang lebih tinggi daripada segala benda dan rupa dunia, yaitu kepada hak, keadilan dan keutamaan yang batasnya dan ukurannya telah ditentukan oleh Allah SWT,” (Agus Salim, 1928, dalam *Koran Fajar Asia*).

Saat perumusan dasar Negara, tanggal 31 Mei 1945, perdebatan menarik antara Negara berbasis Islam atau kesatuan muncul lebih deras. Pada sisi Islam, untuk menyebut salah satunya, terdapat Ki Bagoes Hadikoesoema yang berhadapan dengan Dr. Soepomo dari kubu nasionalis.

Ki Bagoes Hadikoesoema mengemukakan dengan tegas ihwal perlunya Islam sebagai dasar Negara. Ia menyatakan bahwa “agama merupakan pangkal persatuan”, “Islam membangun pemerintahan yang adil dan menegakkan keadilan, berdasar kerakyatan dan musyawarah serta kebebasan memeluk agama”, “Islam tidak bertentangan bahkan sesuai dengan kebangsaan kita”, “Islam merupakan ajaran lengkap yang menyuruh masyarakat didasarkan atas hukum Allah dan agama Islam”, dan “selama periode kolonial kaum imprealis senantiasa berusaha melenyapkan agama Islam dan hukum Islam”.

Pada pihak lain, Soepomo menyatakan ihwal perlunya kesatuan semua orang di Indonesia. Mendirikan Negara Islam, bagi Soepomo, membuat agama-agama yang kecil, tidak bisa mempersatukan dirinya dengan Negara, karena itu “Negara kesatuan” lebih dipilih agar semuanya bisa merasa memiliki. Walaupun demikian, “Negara nasional yang bersatu”, ujar Soepomo, “tidak berarti ‘a religius’. Negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka Negara demikian itu dan hendaknya Negara Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga oleh agama Islam”.<sup>6</sup>

Ada perdebatan, sekaligus ada upaya menemukan jalan tengah: bukan negara agama, namun negara netral agama. Semua jenius bangsa ini menyadari tingkat kerumitan masalah ini, Ketuhanan (sebagai simbol dari agama) harus tetap menjadi roh kehidupan bernegara, namun bukan berarti sebagai negara agama. Muhammad Hatta mengemukakan gagasan sekularisasi yang menarik, “bukan perpisahan antara agama dan Negara” tetapi perpisahan antara urusan agama dan urusan negara”:

Kita tidak akan mendirikan negara dengan dasar perpisahan antara “agama” dan “negara”, melainkan mendirikan Negara modern di atas dasar perpisahan antara urusan agama dengan urusan negara. Kalau urusan agama juga dipegang oleh

---

<sup>6</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, h. 71.

negara, maka agama menjadi perkakas negara, dan dengan itu hilang sifatnya yang murni. [Mohammad Hatta, dalam *Agama dan Negara*, 1945]<sup>7</sup>

Masing-masing pemeluk dan organisasi agama masih diberi kebebasan mengelola urusan agamanya, Negara tidak boleh ikut campur, namun bukan berarti Indonesia adalah Negara agama. Gagasan serupa secara lebih artikulatif dikemukakan Soekarno:

“Bukan saja bangsa Indonesia ber-tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad saw, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi, marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia, ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya berTuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme-agama”. Dan, hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan”, (Soekarno, “uraian prinsip Ketuhanan”).<sup>8</sup>

Frasa “Bangsa Indonesia ber-Tuhan” atau dalam wacana sekularisme “Negara ber-Tuhan” adalah konsep jalan tengah dari “Negara Agama” versus “Negara tanpa Agama”. Indonesia bukan Negara Agama, tetapi Negara ber-Tuhan, demikian kira-kira jalan tengah yang dihasilkan para jenius bangsa yang tidak bisa membayangkan ruang publik Indonesia hampa Tuhan.<sup>9</sup>

Sebagai “Bangsa yang ber-Tuhan”, Indonesia mengizinkan adanya pelbagai agama, bahkan mendorong semua rakyat Indonesia menjalankan agamanya masing-masing. Agar tidak terjadi pertentangan antaragama; yang pada dirinya memiliki klaim lebih benar seraya menganggap agama lain tidak benar, cara ber-Tuhan ini diselenggarakan secara berkebudayaan.

Ketuhanan yang berkebudayaan oleh Soekarno diterjemahkan sebagai “dengan tiada egoisme-agama”, Hatta menyebutnya sebagai “pemisahan urusan agama dan urusan Negara, bukan pemisahan agama dan Negara”. Kedua rumusan ini ditafsirkan Yudi Latif sebagai “toleransi kembar”, yakni “Situasi ketika institusi agama menyadari batas otoritasnya untuk kemudian mengembangkan toleransi terhadap fungsinya masing-masing (2012: 101). Karena itu, bagi Yudi Latif, ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai Ketuhanan yang positif, yang digali dari nilai-nilai profetis agama-agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan (2012: 115). Sebab, pada hakikatnya, setiap agama memiliki kepedulian bersama dalam persoalan publik yang menyangkut keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan keberadaban. Oleh karena itu, setiap agama harus mencari titik temu dalam semangat gotong-royong untuk membentuk semacam “*civic religion*” bagi pengelolaan ruang publik bersama (2012: 119).

Toleransi kembar mendorong semua pemeluk agama menjalankan agamanya secara taat sesuai dengan ajarannya masing-masing, namun di ruang publik semuanya bersatu mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik-politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan dan keadilan sosial. Melalui cara ini, Indonesia tetap berpegang teguh pada nilai-nilai

---

<sup>7</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, h. 73 memberikan catatan, bahwa hampir dipastikan pandangan ini dikemukakan dalam giliran pidato Moh. Hatta di BPUK, 30 Mei 1945, selama 1 jam.

<sup>8</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, h. 74

<sup>9</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, h. 67.

ketuhanan sekaligus nilai kebangsaan, atau –meminjam istilah Soekarno—menjadi “Negara sebagai perkakas dari Tuhan” dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Sinergi ini “diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter, melahirkan bangsa dengan etos kerja positif, memiliki ketahanan serta kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi yang diberikan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”.<sup>10</sup>

Semua perdebatan gagasan bernas itu dikemukakan Yudi Latif pada buku *Negara Paripurna* yang diperkuat dengan kisah-kisah perilaku dalam buku *Mata Air Keteladanan*. Buku *Mata Air Keteladanan* menunjukkan bahwa gagasan Pancasila bukan gagasan kosong, tetapi sudah hidup dan dihidupi oleh rakyat Indonesia, bahkan oleh tokoh-tokoh agama. Beberapa kutipan dari buku *Mata Air Keteladanan* dapat dikemukakan berikut ini.

“Terbanglah kapal udaraku datang di daerah Aceh, Rakyat Aceh menyambut kedatangan Presiden, rakyat beragama Islam. Terbang, lagi kapal udaraku, turun di Siborang-borong daerah Batak. Rakyat Bayak menyambut dengan gegap-gempita kedatangan Presiden Republik Indonesia, agamanya Kristen..”

Demikian pidato Soekarno (Kongres Rakyat Jawa Timur, 24 September 1955) menggambarkan apa yang disebut Yudi Latif “toleransi kembar”: tetap taat dalam agamanya masing-masing, namun bersatu memuliakan dan membangun bangsa. Pidato Soekarno ini adalah bukti implementasi “ketuhanan yang berkebudayaan” yang dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia secara alamiah.

Pada ranah pergaulan hidup kemasyarakatan, tokoh bangsa menunjukkan laku toleransi kembar ini, di antaranya: Bung Hatta misalnya, menjalin hubungan yang saling mengasihi dengan tokoh Ahmadiyah, Sayyid Shah Muhammad al-Jaeni, keduanya saling menjenguk saat sakit, saling bertukar gagasan. Kyai Ahmad Dahlan, seorang penganjur Islam “murni” (puritan) ternyata sangat toleran pada tokoh-tokoh Budi Utomo yang abangan, satu relasi yang kemudian berbalas kebaikan: saat Muhammadiyah dibangun di Karangakajen, orang-orang Budhi Utomo meminjamkan uang dan meminjamkan uang ke Bank.

Kemudian saat KH. Hasyim Asyari menyerukan pentingnya persatuan pada Muktamar NU ke-11, 1936, Hamka (yang Muhammadiyah) menyambut dengan apresiatif, “*Wasiat keagamaan yang sangat penting, tidak saja bagi anggota NU, tetapi juga bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Wasiat ini tidak saja penting selama hidup Hadratus Syaikh, tetapi juga menjadi pedoman bagi setiap Muslim setelah kepergian beliau*”. Keseluruhannya ini, dan tentu ada banyak kisah teladan lain, adalah bukti hidupnya “toleransi kembar”.

Toleransi Kembar ini didasari oleh welas asih, karena “saling menolong dan membantu serta saling mencintai itulah dasar segala agama”, tulis RA Kartini. Prinsip Welas Asih inilah yang diperjuangkan dan diajarkan KH. Ahmad Dahlan saat ia berulang kali membaca surat al-Maun agar jemaah Muhammadiyah “mencari orang yang

---

<sup>10</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, h. 118.

paling miskin di sekitarnya, kemudian diminta memandikannya dan menyuapinya”.<sup>11</sup> Prinsip Welas Asih ini juga dikemukakan oleh Hatta dengan bernas:

“Masing-masing golongan bisa memahami arti Ketuhanan Yang Maha Esa itu menurut paham agamanya. Tetapi, nyatalah bahwa inti dari Ketuhanan Yang Maha Esa itu ialah penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Jikalau di antara manusia dengan manusia tidak ada harga menghargai, maka tidak bisa dicapai satu susunan dunia. Di antara manusia ada yang kaya ada yang miskin, ada yang berbeda kecakapannya, ada yang bodoh ada yang pintar, tetapi sebagai makhluk Tuhan ia dipandang sama”, (Hatta, 1977).

Keseluruhan uraian mengenai sila pertama di atas menunjukkan satu kerangka pengembangan Pancasila sebagai nilai yang hidup dan dihidupi. Perdebatan Negara agama versus Negara sekular telah selesai dengan jalan tengah “Negara ber-Tuhan”. Pelaksanaan beragama di Negara ber-Tuhan didasarkan pada kesadaran berkebudayaan yang tidak didasarkan “egoisme-agama”. Ketuhanan yang berkebudayaan itu adalah cara beragama yang “memandang sama pada semua makhluk Tuhan”, sehingga muncul sikap “harga-menghargai”, “saling menolong dan membantu serta saling mencintai”.

Nilai inti dari Sila Pertama, kemudian dikuatkan oleh sila-sila lainnya, adalah welas asih atas dasar Cinta Tuhan, yang proaktif, kemudian melahirkan sikap berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan, berbuat baik dengan amanah, jujur, dan bersih.

## **Sila Kedua**

Kerangka yang sama dapat dirumuskan juga pada sila-sila lain. Pada sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Yudi Latif merumuskan bahwa konsekuensi dari diterapkannya nilai kedua ini bersifat ganda, yakni ke dalam dan ke luar:

*Pertama*, ke dalam: Menjadi pedoman negara untuk memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak dasar/asasi manusia, dengan menjalankan fungsi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.<sup>12</sup> Di samping itu, sebagai penguat aspek ke dalam, di tempat lain ditegaskan: Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itu menuntut pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur (2012:243).

*Kedua*, ke luar: Menjadi pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.<sup>13</sup>

Konsep “Kemanusiaan” yang universal, sebagai pengaruh dari humanisme modern, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang terbuka. Indonesia bukan

---

<sup>11</sup> Latif, Yudi, *Mata Air Keteladanan...*, h. 44.

<sup>12</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, h. 241.

<sup>13</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, h. 241.

negara untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kemanusiaan secara universal berdasarkan ketuhanan.

Pancasila menjelaskan serta menegaskan corak warna atau watak rakyat kita sebagai bangsa-bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang menginsyafi keluhuran dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar perikemanusiaan yang universal, meliputi seluruh alam kemanusiaan, yang seluas-luasnya, pula dalam arti kenegaraan pada khususnya. [Ki Hajar Dewantara, dikutip dari *Pancasila Dasar Falsafah Negara* karya Notonagoro, 1974:11]<sup>14</sup>

Prinsip kemanusiaan dari sila kedua ini memiliki konteksnya saat ini. Di tengah krisis dan tantangan globalisasi, Indonesia harus mampu menempatkan kepentingan nasional dalam bingkai nilai kemanusiaan, dengan menjaga sikap empati bagi yang menderita dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam memecahkan konflik dalam masyarakat nasional dan internasional. Suatu *vision* perlu didukung oleh *passion* agar ideal-ideal kemanusiaan bisa diwujudkan di bumi kenyataan".<sup>15</sup> Ada nilai empati, pada sila kedua. Nilai yang pada sisi tertentu lahir dari nilai welas asih.

### **Sila Ketiga**

Sila ketiga: Persatuan Indonesia, bagi Yudi Latif diletakkan dalam kerangka *civic-political - nationalism* yang mensyaratkan loyalitas warga pada seperangkat cita-cita politik dan kelembagaan yang dianggap adil dan efektif<sup>16</sup> Selain itu, dalam mentransformasikan ke-*Kami*-an menuju ke-*Kita*-an, diperlukan sikap positif dan prasangka baik. Kerjasama dan sikap saling memercayai serta iktikad baik masing-masing komunitas yang diperkuat oleh jalinan gotong-royong secara fungsional antara pelbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi demokrasi dalam suatu masyarakat multikultur<sup>17</sup> Dan karenanya: kebangsaan Indonesia adalah ekspresi rasa syukur atas desain sunnatullah (hukum Tuhan) yang menciptakan perbedaan, dengan menjunjung tinggi kesetaraan kemuliaan manusia, dengan mengembangkan sikap positif terhadap kemajemukan bangsa, melalui perwujudan demokrasi permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial.<sup>18</sup>

Prinsip-prinsip nilai "persatuan" ini telah dibangun oleh para jenius bangsa, seperti terlihat pada kutipan berikut:

"Manusia harus bersatu, agar tercipta kebaikan dan kesejahteraan, dan agar terhindar dari kehancuran dan bahaya. Jadi, kesamaan dan keserasian pendapat mengenai penyelesaian beberapa masalah adalah prasyarat terciptanya kemakmuran. Ini juga akan mengukuhkan rasa kasih sayang. Adanya persatuan dan kesatuan telah menghasilkan kebajikan dan keberhasilan. Persatuan juga telah mendorong kesejahteraan Negara, peningkatan status rakyat, kemajuan dan

---

<sup>14</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, h. 241.

<sup>15</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, h. 242.

<sup>16</sup> Latif, Yudi *Negara Paripurna...*, h. 374.

<sup>17</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, h. 376.

<sup>18</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, h. 376

kekuatan pemerintah, dan telah terbukti sebagai alat untuk mencapai kesempurnaan. Satu dari banyak tujuan persatuan adalah bersemainya kebajikan yang akan menjadi sebab terlaksananya berbagai ide." [KH. Hasyim Asy'ari dalam Al-Mawaizh, pada Mukhtamar NU Ke-11 di Banjarmasin, 1936]

Sebeloem kami memoelai membitjarakan ini, patoetlah rasanja kalau kami terangkan lebih dahoeloe, mengapa kami tidak memakai bahasa Belanda atau bahasa Djawa. Boekan sekali-kali karena kami hendak merendah-rendahkan bahasa ini, atau mengoerang-ngoerangkan harganja. Itoe sekali-kali tidak. Tetapi barang siapa di antara toean jang mengoendjoengi kerapatan pemoeda di kota Djacatra (Betawi), jang diadakan beberapa boelan jang laloe atau setelah membatja poetoesan kerapatan jang terseboet, tenoe masih mengingat akan hasilnja, jaitu hendak berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia, hendak bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia, dan hendak mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia. Oleh karena jang tersebut inilah maka kami sebagai poetry Indonesiab jang lahir dipoelau Djawa jang indah ini berani memakai bahasa Indonesia dimoeka ra'jat kita ini. Boekankah kerapatan kita kerapatan Indonesia, ditimboelkan oleh poetry Indonesia dan dioentoekkan bagi seloeroeh kaoem istri dan poetry Indonesia, beserta tanah toempah darah dan bangsanja. [Siti Soendari, dalam Kongres Perempuan Indonesia, 22-25 Desember 1928] <sup>19</sup>

Masyarakat yang terkotak-kotak dengan masing-masing penuh curiga kepada satu sama lainnya bukan saja mengakibatkan tidak efisiennya cara hidup demokratis, tapi juga dapat menjurus kepada lahirnya pola tingkah laku yang bertentangan dengan nilai asasi demokrasi. Pengakuan akan kebebasan nurani (freedom of conscience), persamaan hak dan kewajiban bagi semua (egalitarianism), dan tingkah laku penuh percaya kepada itikad baik kepada orang dan kelompok lain mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis. [Nucholish madjid, 1995: 67] <sup>20</sup>

Dari sila ketiga, lahir nilai kerjasama, gotong royong, yang meleburkan ke-Kami-an menjadi ke-Kita-an. Dalam "Kita", muncul sikap positif dan prasangka baik, kerja sama dan sikap saling memercayai serta iktikad baik dalam jalinan gotong-royong. Sila ketiga dapat disederhanakan sebagai implementasi dari prinsip kekeluargaan, terus 55ersama di tengah sejumlah perbedaan, jika ada konflik dan masalah itu berarti undangan untuk menyelesaikannya secara bersama. Ke-Kita-an ini dibangun oleh rasa mencintai, rasa persatuan, rasa kekeluargaan yang hanya bisa diwujudkan dengan kerelaan berkorban, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan" (2012: 343).

Berani merdeka berarti berani mempertahankan Indonesia, dan ini berarti berani berperang. Buat ini perlu persatuan sekokoh-kokohnya. Persatuan berarti bebas dari rasa perselisihan antara golongan, menyingkirkan diri, dan golongan sendiri,

---

<sup>19</sup> Dari kutipan ini, menandakan bahwa dalam tempo cepat dari keberanian Siti Soendari menggunakan bahasa Indonesia, dengan melepaskan diri dari bahasa ibunya (Jawa) dan bahasa intelektualnya (Belanda), merupakan symbol dari kuatnya komitmen kebangsaan baru kala itu. Lihat, Latif, Yudi *Negara Paripurna...*, h. 322-323.

<sup>20</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, 376.

hanya dapat tercapai dengan korban. [Sosrodiningrat, 29 Mei 1945, dalam pembentukan BPUPK] <sup>21</sup>

### Sila Keempat

Sila Keempat: “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah/Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” melahirkan nilai lain yang saling terkait dengan sila lainnya. “Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, meliputi dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [Notonegoro, 1974]<sup>22</sup>

Sila ini digali dari konteks bahwa prinsip pemerintahan mayoritas—berdasarkan kesetaraan hak warga negara (*demokrasi*)—dengan menghormati hak-hak minoritas (*majority rule, minority rights*) mengandaikan adanya kedaulatan rakyat berlandaskan semangat kekeluargaan. <sup>23</sup>

Sila keempat, dengan kata kunci “hikmah” dan “permusyawaratan” menuntut agar segala kekuatan dalam masyarakat, tanpa pandang bulu, harus diberi akses ke dalam proses pengambilan keputusan. Wakil-wakil rakyat berdialog dengan pengetahuan dan kearifannya, bukan dengan kepentingan kelompoknya. Dengan bimbingan hikmat-kebijaksanaan, perilaku politik yang etis akan berkembang. <sup>24</sup> Permusyawaratan menguatkan “ke-Kita-an” ke dalam tindakan praksis kehidupan bersama, mufakat menjadikan ke-Kita-an menjadi dinamis dan progresif.

Dasar itu ialah mufakat, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu Negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan Negara ‘untuk semua’, ‘satu untuk semua, semua untuk satu’. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. [Soekarno, 1 Juni 1945]

Sila keempat, atau permusyawaratan perwakilan, menciptakan demokrasi model Indonesia yang khas, yang tidak identik dengan gagasan asli demokrasi di Barat.

“... Bagi kita bangsa Indonesia, demokrasi atau kedaulatan rakyat mempunyai corak nasional, satu corak kepribadian kita, satu corak yang dus tidak perlu sama dengan corak demokrasi yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa lain sebagai alat teknis. Artinya, demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia, demokrasi yang disebut sebagai sila keempat itu adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Tidak perlu ‘identik’ artinya sama dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain. [Soekarno, 1958] <sup>25</sup>

Selain permusyawaratan perwakilan demi mufakat, demokrasi permusyawaratan didasarkan pada hikmah/kebijaksanaan. Yudi Latif menafsirkan hikmah itu menjadi empat prasyarat penetapan keputusan politik, yakni <sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, 328-329.

<sup>22</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, 485.

<sup>23</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, h. 379.

<sup>24</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, h. 487.

<sup>25</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, 475-476.

<sup>26</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, 473.

1. Bersifat imparial (tanpa pandang bulu), dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal diktator mayoritas dan tirani minoritas;
2. Didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan;
3. Berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif); dan
4. Harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan”.

Dari sila ke-4 ini lahir nilai musyawarah, memperkuat ke-kita-an dengan berbagi pengetahuan dan kearifan, serta kerelaan untuk dipimpin berdasarkan panduan hikmah-kebijaksanaan.

### **Sila Kelima**

Sila kelima, “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”, satu sila yang diangankan oleh Soekarno sebagai prinsip kesejahteraan, prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka [Soekarno, 1 Juni 1945].<sup>27</sup> Kesejahteraan adalah wujud merdeka 100% dalam istilah Tan Malaka: “Merdeka 100%” adalah jaminan buat terus merdekanya Indonesia. Tanpa merdeka 100%, Indonesia takkan bisa mengadakan kemakmuran cukup buat dirinya sendiri.” [Tan Malaka, 2005: 40].

Perwujudan sila kelima terealisasi dalam peyelenggaraan negara kesejahteraan, dan “perwujudan negara kesejahteraan itu sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara—disertai dukungan rasa tanggung jawab, rasa kemanusiaan dan keadilan yang terpancar pada setiap warga”.<sup>28</sup>

Dari sila kelima ini, selain kesejahteraan, juga lahir nilai keadilan. Nilai keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, mantra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.<sup>29</sup> Sebab, kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan bisa dinilai dari usaha nyatanya dalam mewujudkan keadilan social.<sup>30</sup>

Terdapat banyak nilai yang lahir dari pancasila. Keseluruhan nilai Pancasila, yang menjadi model Manusia Indonesia, dapat dirujuk pada pernyataan Mohammad Hatta berikut,

Indonesia, luas tanahnya, besar daerahnya, dan tersebar letaknya. Pemerintahan negara yang semacam itu hanya dapat diselenggarakan oleh mereka yang mempunyai tanggung jawab yang sebesar-besarnya dan mempunyai pandangan yang amat luas. Rasa tanggung jawab itu akan hidup dengan memikirkan kebih dahulu kepentingan masyarakat, keselamatan nusa, dan kehormatan bangsa. Untuk mendapat rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya, kita harus mendidik diri kita dengan rasa cinta akan kebenaran dan keadilan abadi. Hati kita

---

<sup>27</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, 491.

<sup>28</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, 595.

<sup>29</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, h. 606.

<sup>30</sup> Latif, Yudi, *Negara Paripurna...*, h. 607.

harus penuh dengan cita-cita besar, lebih besar dan lebih lama umurnya daripada kita sendiri. [Bung Hatta]<sup>31</sup>

Hatta menegaskan perlunya nilai tanggung jawab, pandangan yang luas, empati, kehormatan, cinta, dan keadilan, yang kesemuanya didasarkan pada hikmah/kebijaksanaan.

Pada bagian selanjutnya di bawah ini, saya ingin menerjemahkan nilai-nilai Pancasila di atas, melalui metode pendidikan, yang ingin saya sebut "Pendidikan Nilai Pancasila" yang dikembangkan berdasarkan filosofi dan metode yang disebut Pendidikan berbasis nilai (*values-based education*).

## PENTINGNYA MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN NILAI PANCASILA

Pendidikan Nilai Pancasila (selanjutnya disebut PNP saja) merupakan wujud komitmen membangun manusia Indonesia melalui budaya Pancasila dengan cara pendekatan pendidikan nilai (yang sering disebut juga *values-based education*) yang bisa dikembangkan di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. PNP dikembangkan berdasarkan prinsip kesetaraan (*equality*), martabat manusia (*dignity*), penghormatan (*respect*), non-diskriminasi (*nondiscrimination*), dan partisipasi (*participation*). Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Dalam PNP, Pancasila dijadikan rujukan prinsip atau nilai acuan yang menjadi alur pembiasaan perilaku bagi setiap individu di lingkungan pendidikan. Nilai Pancasila dijadikan nilai rujukan bagi pendidikan karakter untuk menjadi model manusia Indonesia, bahkan dijadikan prinsip nilai Pendidikan Karakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, Pancasila dipikirkan (*thought*), dipelajari (*learned*), dipraktikkan (*practiced*), dihormati (*respected*), dan dipromosikan (*promoted*).

Pendidikan Nilai Pancasila (PNP) merupakan pendekatan pendidikan nilai (*values-based education*) terhadap pembelajaran Pancasila. Pendekatan pendidikan nilai berbeda dengan pendekatan moral seperti dahulu pada zaman Orde baru pernah dilakukan dalam Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Moral berbeda dengan nilai. Moral (Latin: *mores*) mengacu pada *idea of custom*, atau ... *the principles of conduct of both ideal and actual*, yaitu prinsip-prinsip tentang perilaku ideal dan aktual. Moral adalah aturan aturan (*rule*) mengenai sikap (*attitude*) dan perilaku manusia (*human behavior*) sebagai manusia.

Nilai lebih umum daripada moral, nilai adalah *idea - a concept - about what someone thinks is important in life*, atau suatu gagasan atau konsep tentang segala sesuatu yang diyakini seseorang penting dalam kehidupan ini; atau menurut Milton Rokeach *A Value is an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end-state of existence*. Jadi, nilai adalah suatu keyakinan yang abadi yang menjadi rujukan bagi cara bertingkah laku atau tujuan akhir eksistensi yang merupakan preferensi tentang konsepsi yang lebih baik atau konsepsi tentang segala sesuatu yang secara personal dan sosial dipandang lebih baik. Nilai tidak memberikan aturan bagaimana bersikap dan berperilaku, nilai adalah gagasan inti yang menjadi sumber tindakan baik.

---

<sup>31</sup> Latif, Yudi, *Mata Air Keteladanan...*, 467.

Pendidikan Moral Pancasila, seperti pernah diterapkan pada Masa Orde Baru, menetapkan sejumlah aturan sikap dan perilaku warga Negara, seperti terlihat dalam butir-butir Pancasila. Sementara pada pendidikan nilai, rumusan bagaimana berlaku secara baik merupakan hasil pemahaman dan penghayatan masing-masing individu. Sebagai contohnya berikut:

<b>Rujukan Utama</b>	Ketuhanan Yang Maha Esa
<b>Moral</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.</li> <li>3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.</li> <li>7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.</li> </ol> <p>(Dikutip dari 45 butir Pancasila berdasar TAP MPR no. I/MPR/2003)</p>
<b>Nilai</b>	Jawaban atas pertanyaan: <i>nilai apa yang terdapat dalam Sila Pertama ini? Gagasan penting apa dari sila pertama ini yang dapat dijadikan rujukan tindakan baik?</i>

Sementara Pendidikan Moral Pancasila menetapkan aturan bertindak, misalnya ada 7 aturan bertindak baik untuk sila pertama Pancasila, Pendidikan Nilai tidak menetapkan aturan bertindak baik berdasar Pancasila. Pancasila dijadikan sumber kebaikan (*virtue*) yang akan melahirkan nilai (*value*) saat individu memahami sila pertama ini dan merefleksikannya dalam perilaku dirinya.

Pendekatan nilai, dengan demikian, menjadikan Pancasila sebagai rujukan prinsip atau nilai acuan yang menjadi alur pembiasaan perilaku bagi setiap individu di lingkungan pendidikan. Ilustrasinya bisa digambarkan sebagai berikut:

1. Hal pertama yang biasa dipahami seseorang saat memahami sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa manusia Indonesia yang Pancasila haruslah bertuhan, beriman, beragama, dan menjadikan kebaikan Tuhan sebagai rujukan kehidupannya.
2. Saat seseorang hidup bersama dalam kemajemukan, sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini akan melahirkan pemahaman bahwa yang berbeda agama pun berhak untuk menjalankan agamanya, karena itu semua agama dan cara beragama harus dihormati.

Hasilnya bisa jadi sama dengan moral Pancasila, namun ada perbedaan mendasar dari sisi produsennya. Sementara moral Pancasila ditetapkan, nilai Pancasila merupakan hasil dari pemahaman dan perenungan masing-masing individu. Saat setiap orang, sebagai warga negara, diberi peluang menemukan nilai dari Pancasila dan menjadikan nilai temuan itu sebagai acuan tindakannya Pancasila menjadi hidup secara lebih nyata.

Apa hubungan antara pendidikan nilai dengan pendidikan karakter?

Lickona (1991) menyatakan bahwa pendidikan karakter bertujuan agar peserta didik memiliki *moral action*, bukan hafalan definisi tentang moral, namun tentang bagaimana nilai moral itu dapat hidup dalam perilaku. Untuk mendorong anak mencapai *moral action*, bagi Lickona, diperlukan tiga proses pembinaan yang secara berkelanjutan di mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling* hingga *moral action*. Ketiga aspek ini dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan, yaitu:

1. *Moral knowing*, meliputi aspek *moral awareness* (pengetahuan tentang baik atau buruk), *knowing moral values* (pengetahuan tentang nilai moral), *perspective-taking* (memanfaatkan pandangan orang/ulama tentang moral), *Moral reasoning* (pertimbangan moral), *Decision making* (membuat keputusan moral), dan *self-knowledge* (pengetahuan tentang dirinya).

Pada aspek ini pendidikan karakter membutuhkan pengetahuan tentang nilai baik buruk. Nilai itu menjadi dasar pertimbangan dan sumber keputusan dalam melakukan tindakan yang tidak hanya sesuai dengan aturan bersama juga sesuai dengan kebutuhan dirinya pribadi.

2. *Moral feeling*; meliputi *conscience* (kesadaran akan moral; baik dan buruk), *self esteem* (rasa harga diri), *emphaty* (rasa empati), *loving the good* (cinta kebaikan), *self control* (pengendalian diri), dan *humality* (rendah hati). Rasa bermoral dibangun oleh kesadaran yang akan membentuk harga diri kita, sikap empati dan cinta kebaikan. Dari rasa bermoral ini seseorang akan pandai mengendalikan diri dan rendah diri.
3. *Moral action*, meliputi *competence* (kompetensi dalam menjalankan moral), *will* (kemauan berbuat baik dan menjauhi yang jahat), dan *habit* (kebiasaan berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat dan jelek).

Ketiga tahapan pendidikan karakter yang dikemukakan Lickona ini mengandaikan adanya nilai-nilai yang dijadikan rujukan. Nilai menjadi prinsip dalam pendidikan karakter. Prinsip adalah hukum alam bagi perilaku manusia. Prinsip sama seperti hukum gravitasi bagi benda yang niscaya akan memengaruhi benda tersebut. Lalu apakah yang dapat menjadi prinsip Pendidikan Karakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Kita meyakini bahwa Pancasila merupakan jawabannya. Lalu, kenapa Pancasila?

Berikut ini alasan Pancasila sebagai sumber nilai dalam pendidikan karakter. *Pertama*, Pancasila memiliki sejumlah prinsip universal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, bahkan bisa diterima oleh semua bangsa. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, misalnya, prinsip universal dan akan diterima semua pihak. Kemanusiaan adalah gagasan manusia modern, bahwa yang dapat menjadi dasar bagi relasi antar manusia agar tercipta kemajuan adalah pertimbangan kemanusiaan. Dalam Pendidikan Nilai Pancasila, nilai kemanusiaan dalam sila kedua berrelasi dengan nilai-nilai dalam sila lainnya.

*Kedua*, kemajemukan Indonesia membutuhkan nilai bersama yang adil dan beradab. Tanpa nilai bersama yang disepakati sebagai prinsip hidup bersama, negara majemuk akan terpecah-pecah oleh kepentingan kelompok-kelompok. Pancasila telah cukup menunjukkan akomodasi semua nilai dan prinsip kehidupan seluruh masyarakat, ras, agama, dan ideologi. Supaya Negara majemuk ini dapat terus bertahan, basis nilai-nilai dalam pendidikan karakter harus merujuk pada Pancasila.

*Ketiga*, bila suatu pendidikan karakter mengajukan prinsip kehidupan yang baru, bisa jadi menjadikan seseorang berkarakter unggul, namun belum tentu membuat mereka memiliki jiwa nasionalisme dan menjadi warga Negara yang baik dari negara yang mejemuk; Indonesia. Secara umum, setiap lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai cerminan dari masyarakat yang lebih luas, pendidikan adalah kunci untuk mensosialisasikan Pancasila kepada generasi muda, mempersiapkan setiap individu untuk menjadi anggota masyarakat yang terlibat aktif dan bertanggung jawab secara demokrasi. Sebab dalam globalisasi di abad 21, generasi muda menghadapi dunia beragam dengan perubahan yang cepat di sekitar mereka, di mana kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan menjadi bagian kehidupan nyata masyarakat dunia.

Melalui PNP, lembaga pendidikan memiliki kontrol kreatif dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di lingkungan sekitar, bahkan sangat harmoni dengan kerangka pendidikan hak asasi manusia (Human Rights Education) secara luas. PNP mampu menciptakan lembaga pendidikan yang memiliki bahasa Pancasila, yakni bahasa tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan (permusyawaratan perwakilan), dan keadilan sosial.

Selain itu, PNP merupakan sarana penting untuk menanamkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dapat menumbuhkan Etos Budaya Pancasila. Etos Budaya Pancasila berupa atmosfer yang menghidupkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan (permusyawaratan perwakilan), dan keadilan sosial. PNP adalah praktik partisipatif yang ditujukan untuk memberdayakan individu dan komunitas, melengkapi mereka dengan pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk “menikmati” nilai-nilai Pancasila.

Pengertian menikmati nilai Pancasila dalam membangun budaya Pancasila, artinya berbagai aktivitas berbasis nilai Pancasila dalam metode pendidikannya (PNP) menekankan hal-hal berikut ini, yang berkesinambungan:

- a. *Learning, knowledge and concepts; concept and knowledge*
- b. *Educational practice and interdisciplinary projects; practice and project for action*
- c. *Debates about values: Debate is a constituent element of a democracy society*

Dalam kehidupan sehari-hari, PNP memberi makna hubungan antar manusia dalam kehidupan individu dan sosial, dalam pergaulan berbangsa dan bernegara. Menghormati martabat dan harga diri manusia, menghargai kebebasan orang lain, hubungan sosial yang setara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sesuai dengan kerangka hak asasi manusia, berarti membuka kemungkinan terciptanya hubungan sosial menjadi adil, memiliki hokum bersama yang etis dan demokratis. Memungkinkan kita untuk 'hidup bersama' secara damai, menyelesaikan konflik individu dan sosial dengan cara negosiasi dan dialog. Dengan kata lain, PNP memungkinkan untuk benar-benar menyelaraskan moralitas individu dengan hukum dalam mengatur hubungan sosial berbangsa dan bernegara.

### **Tujuan Pendidikan Nilai Pancasila**

Tujuan pendekatan Pendidikan Nilai Pancasila adalah:

*“Menyediakan prinsip-prinsip panduan dan cara menghidupkan nilai Pancasila, bagi pengembangan manusia Indonesia seutuhnya dengan mengenali bahwa individu terbentuk dari dimensi fisik, intelektual, emosional, dan spiritual.”<sup>32</sup>*

PNP perlu menyediakan “prinsip-prinsip panduan dan cara menghidupkan nilai Pancasila bagi pengembangan manusia Indonesia seutuhnya”. Prinsip bukanlah rincian, hanya hukum umum yang jadi rujukan. PNP memberikan keleluasaan bagi para pendidik untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Di samping itu “prinsip panduan dan cara” yang disediakan membuat Pendidikan Nilai Pancasila bisa digunakan untuk proses pengajaran apapun. Kemudian “bagi pengembangan manusia Indonesia seutuhnya” (dalam arti fisik, intelektual, emosional dan spiritual) menjadikan Pendidikan Nilai Pancasila sesuai dengan prinsip manusia dalam Pancasila, yang tak hanya fisik, intelektual, dan emosional, melainkan spiritual; ber-Tuhan.

Pengembangan manusia Indonesia seutuhnya dapat dilakukan saat pendidik mengenali bahwa Individu (siswa dan dirinya) terbentuk dari dimensi fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Keempat dimensi manusia ini, tak ada satupun yang lebih tinggi dari yang lainnya karena setiap dimensi itu penting, harus utuh, dan saling melengkapi. Pengenalan terhadap keempat dimensi ini menjadi prinsip utama pendidik dalam proses pembelajarannya, sehingga menciptakan individu yang berani menyuarakan aspirasinya, memperjuangkan HAM, memiliki perhatian pada isu dan masalah bangsa.

Manusia Pancasila adalah manusia seutuhnya: bertuhan, berpijak pada kemanusiaan, cinta tanah air dan mempertahankannya, demokratis, dan sadar-sosial. Kelima aspek pancasila ini harus terus disadari pendidik saat melakukan pembelajaran PNP. Contohnya dalam proses pembelajaran, syarat utama pembelajaran efektif adalah jika pendidik dan siswa “sepenuhnya di sini”. Di mana fisik, intelektual, emosional, dan spiritual dihadirkan oleh diri sendiri di ruang dan waktu saat itu. Ada satu teknik yang ditawarkan PNP untuk bisa membuat siswa dan pendidik “sepenuhnya ada-di-sini”, yakni *relaksasi*, hening menyadari nafas dan pikiran. Pada relaksasi ada aktivitas mengambil-menghembuskan nafas beberapa kali dengan santai, menenangkan pikiran dan otot-otot tubuh, kesemuanya itu sangat membantu “menghadirkan” diri siswa dan pendidik di kelas. Dari berbagai kesibukan dan tercerai berai dalam kesibukan rutinitas, siswa dan pendidik diminta untuk hadir semua di sini; intelektual, emosional, spiritual, dan fisik kita.

Pendekatan Pendidikan Nilai terhadap pembelajaran Pancasila mendorong semua pendidik menyentuh emosional dan spiritual (intrapersonal), menyentuh intelektual dengan sharing, dan interaksi fisik interpersonal. Semuanya itu dapat lebih jelas dalam tujuan PNP. Tujuan ini akan lebih rinci diurai pada sasaran Pendidikan Nilai Pancasila berikut ini:

### **Sasaran Pendidikan Nilai Pancasila**

Sasaran PNP berarti apa yang akan didapatkan pendidik dengan menerapkan ‘prinsip-prinsip panduan dan cara menghidupkan nilai’ pada -cara modul ini dalam pembelajaran Pancasila. Ada 4 sasaran yang dicanangkan PNP ini, yakni:

---

<sup>32</sup> Tujuan dan Sasaran Pendidikan Nilai Pancasila ini diadaptasi dari tujuan dan sasaran Living Values Education, namun diuraikan secara berbeda sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Nilai Pancasila. Lihat Diane Tillman dan Pilar Quera Colomina. *Living Values: An Educational Program LVEP Educator Training Guide* - Pendidikan Nilai: Program Pendidikan LVEP Panduan Pelatihan bagi Pendidik (Jakarta: Grasindo, 2004), 37-38.

**Sasaran Pertama:**

“Membantu setiap individu memikirkan dan merefleksikan dan sekaligus menerapkan nilai-nilai Pancasila secara praktis sebagai ekspresi diri dalam hubungannya dengan diri mereka sendiri, orang lain, masyarakat dan lingkungan yang lebih luas.”

Prinsip panduan dari sasaran pertama ini adalah seorang pendidik dalam pembelajaran Pancasila tidak memaksa atau mendoktrin nilai Pancasila, melainkan hanya “membantu siswa” menghidupkan nilai Pancasila. Cara menghidupkan nilai yang ditawarkan adalah memikirkan, merefleksikan, dan menerapkan nilai Pancasila. Hasil yang akan diperoleh: tindakan Pancasila siswa sebagai ekspresi diri dalam hubungannya dengan diri mereka sendiri, orang lain, masyarakat dan lingkungan yang lebih luas.”

Sasaran pertama menunjukkan prinsip pembelajaran PNP: (1) buku ini dirancang agar pendidik dapat membantu siswa memikirkan, merefleksikan, dan menerapkan nilai Pancasila; (2) Penerapan nilai Pancasila harus merupakan ekspresi diri siswa, bukan skenario dari luar dirinya. Ini berarti penerapan nilai Pancasila harus lahir dari kesadaran diri siswa setelah ia memikirkan dan merefleksikannya. Penerapan nilai-nilai Pancasila ini dilakukan dalam segala aspek relasi siswa baik dengan dirinya sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan yang lebih luas.

Sasaran pertama ini berisi tiga tahapan pendidikan Karakter Lickona: *moral knowing, moral feeling, moral action*. Memikirkan menghasilkan pengetahuan, kegiatan refleksi menghasilkan kesadaran, dan penerapan menghasilkan *moral action*. Jadi ada tiga tahap yang dipesankan sasaran pertama ini, yakni *pahami-refleksikan-terapkan* yang menghasilkan *tahu-sadar-laku*. Apa yang harus “pikirkan-refleksikan-terapkan”? Jawabannya: Nilai-nilai Pancasila adalah yang harus dipikirkan, direfleksikan, dan diterapkan.

Tiga Tahapan Proses Pembelajaran PNP			
	PROSES	HASIL	TEORI
<b>PENDIDIK Membantu Siswa</b>	Pahami	<b>TAHU</b> (Pengetahuan)	<i>Moral Knowing</i>
	Refleksikan	<b>SADAR</b> (Kesadaran)	<i>Moral Feeling</i>
	Terapkan	<b>LAKU</b> (Tindakan)	<i>Moral Action</i>

**Memikirkan:** Berpikir adalah proses menemukan kaitan-kaitan logis, sebab akibat, dari nilai dan tindakan. Nilai-nilai Pancasila, dengan demikian, merupakan hasil pemahaman siswa terhadap kehidupan dirinya dalam kaitannya dengan sila-sila Pancasila. Dengan “memikirkan” siswa dapat memahami kaitan antara sila Pancasila dengan nilai tertentu, hubungan antara nilai yang satu dengan nilai lain, merelasikan dasar dari tindakan, memahami apa efek dari nilai tertentu, dan sejenisnya.

**Merefleksikan:** Memantulkan pada diri kita. Ilustrasinya adalah aktivitas bercermin yang biasa kita lakukan setiap pagi, kita memantulkan agar dandanannya pantas; agar sesuai menurut indikator (pemikiran-pemahaman) kita. Dalam pengobatan refleksi, tabib memberikan totokan bukan pada sumber sakitnya, tetapi memberikan

tekanan pada titik lain yang berhubungan dengan sumber sakit, agar terrefleksi atau terpantul pada sumber sakit yang dituju. Dalam konteks PNP, nilai-nilai yang sudah dipahami ini dijadikan cermin perbaikan diri bagi pendidik dan siswa: apakah saya seperti itu? Apakah yang saya lakukan ini bernilai Pancasila?

**Menerapkannya secara praktis:** Pendidikan Nilai Pancasila memberikan dorongan agar siswa dapat merumuskan tindakan konkret dari nilai-nilai Pancasila yang telah dipahami dan direfleksikan tersebut. Setelah itu siswa mempraktekannya dalam interaksi sosial seperti saling menghargai, penuh tanggung jawab (cinta tanah air), dan menjaga persatuan masyarakat Indonesia.

**Nilai-nilai Pancasila** adalah nilai-nilai Pancasila sejauh dipahami oleh siswa. Nilai Pancasila tidak dipatenkan, walaupun ada nilai Pancasila seperti dikemukakan Yudi Latif tetap saja dianggap sebagai tafsir atas Pancasila. PNP mendorong siswa untuk menjawab pertanyaan, "Apa nilainya?" Secara sederhana, ada dua proses yang dilakukan dalam menggali nilai, yakni dari pengalaman dan dari Pancasila, yaitu:

*Pertama*, proses penggalian (memahami dan merefleksikan) nilai dari pengalaman dilakukan dengan cara siswa merefleksikan pengalaman istimewa dirinya. Pengalaman istimewa ini kemudian dicarikan nilainya melalui pertanyaan, "Apa nilainya?" Setelah melalui pertanyaan ini siswa didorong untuk mengungkapkan nilai-nilai yang ia pahami dan rasakan. Akan muncul begitu banyak nilai-nilai yang berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain, sejumlah nilai itu direnungkan untuk kemudian disesuaikan dengan nilai yang dianggap sama dan cocok dengan diri siswa. Dari perbedaan itu ada nilai-nilai yang dianggap sama, sebut saja sebagai nilai universal. Nilai-nilai yang sama itu lalu dihubungkan dengan nilai Pancasila.

*Kedua*, siswa dapat menggali nilai dari salah satu sila dari Pancasila. Nilai yang ditemukan dikaitkan dengan nilai-nilai pengalamannya. Melalui cara ini semua pengalaman adalah pengalaman bernilai, dan semua nilai terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Proses Pendidikan Nilai Pancasila, dengan demikian, menghubungkan nilai-nilai Pancasila dalam pengalaman refleksi nilai dalam kehidupan sehari-hari, serta mendorong setiap orang agar mempraktikkan dan menikmati suasana berbasis nilai dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik.

**Penerapan Nilai Pancasila sebagai ekspresi diri.** Ekspresi Diri berarti mengeluarkan sesuatu dari dalam diri. Penerapan Pancasila, dengan cara ini, merupakan hasil kesadaran Pendidikan Nilai Pancasila meyakini setiap manusia memiliki nilai-nilai yang ditangkap dari perikehidupan dan kearifan keseharian masyarakat Indonesia, yang kemudian butuh dihidupkan kembali agar terasa menjadi perilaku yang lebih baik. Tindakan Pancasila diharapkan:

**Dalam hubungannya dengan diri mereka sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan yang lebih luas:** Diri sendiri-orang lain-masyarakat-lingkungan luas adalah urutan proses, bukan daftar, dan tidak bisa dibolak-balik. Kita dapat merasakan nilai atau berbagi nilai, ketika memiliki nilai-nilai itu. Kita tidak bisa membagikan sesuatu yang tidak kita miliki. Orang jujur, akan membuat orang lain jujur. Orang menghargai, akan membuat orang lain dihargai. Orang damai, bisa membuat orang lain merasa damai, dan memancing orang lain untuk berbuat damai. Nilai hanya bisa dilahirkan dari orang yang memiliki nilai. Setiap orang memiliki nilai yang mungkin berbeda, tetapi nilai itu menjadi karakter atau nilai dominan sebagai bagian tak terpisahkan dari perilakunya. Dalam menjalin hubungan dengan orang lain, individu akan berbagi nilai-nilai yang dimilikinya, sekaligus akan belajar ihwal nilai-nilai berbeda dari orang lain.

**Sasaran Kedua:**

“Memperdalam pemahaman nilai-nilai Pancasila yang mendorong motivasi dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pilihan tindakan pribadi dan sosial positif; tindakan manusia merdeka, tindakan makhluk sosial, dan tindakan warga negara.”

Prinsip panduan yang ditawarkan sasaran kedua adalah “memperdalam pemahaman”.

Setelah proses menggali (melalui memahami dan merefleksikan), peserta didik memperdalam nilai yang ditemukannya agar menjadi kesadaran. Dalam proses ini tidak ada temuan peserta didik yang salah, semua jawaban dapat benar asalkan disadari. Setelah itu PNP mengajukan cara menghidupkan nilai dengan cara “mendorong motivasi dan tanggung jawab untuk bertindak berdasarkan nilai Pancasila”. Apa yang sudah dicobakan dari tahap pertama, diperdalam lagi sehingga mendorong tumbuhnya motivasi untuk terus melakukan laku-pancasilais di luar ruang pembelajaran. Tak hanya menjadi motivasi, pendalaman pemahaman akan nilai mendorong siswa merasa bertanggungjawab untuk menerapkan nilai Pancasila itu dalam seluruh aspek kehidupannya. Hasil yang diinginkan dari sasaran kedua ini adalah agar “siswa menjadikan nilai Pancasila sebagai sumber pertimbangan saat memilih melakukan tindakan”.

**Memperdalam Pemahaman.** Pemahaman berada di wilayah kognitif dalam bentuk kemengertian tertentu. Paham saja tidak cukup mendorong seseorang untuk memiliki karakter baik. Setelah paham, individu harus merasakannya sebagai sesuatu yang menyenangkan jiwanya, setelah itu nilai yang dipahami akan menghuni wilayah kesadarannya. Proses mendorong pengetahuan menjadi sadar inilah yang dimaksud dengan “memperdalam”.

**Mendorong motivasi dan tanggungjawab.** Motivasi hanya berupa dorongan untuk berbuat, sementara tanggungjawab terkait dengan komitmen untuk berbuat. Nilai-nilai Pancasila dapat memotivasi individu untuk bersikap toleran, bertanggungjawab, jujur, dan nilai Pancasila lainnya. Namun orientasi PNP tidak hanya memotivasi, PNP mengharapkan pendidik dan siswa memiliki tanggung jawab untuk mengaktifkan nilai Pancasila untuk kehidupan pribadinya. Tidak hanya itu PNP mengharapkan agar siswa menjadi agen perubahan sosial politik dan budaya berbangsa dan bernegara berlandaskan nilai Pancasila.

**Pilihan tindakan.** Setiap tindakan merupakan hasil dari pilihan sadar individu. Saat orang-orang menyebarkan ujaran kebencian, ada satu dua orang yang memilih untuk tetap menyebarkan informasi kebaikan. Tindakan atas pilihan sadar ini didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang diyakini individu menjadi sumber tindakannya. Nilai sebagai sumber tindakan itu, dalam hal ini, adalah Nilai-nilai Pancasila. PNP mengharapkan nilai-nilai Pancasila selalu menjadi rujukan individu saat memutuskan untuk bertindak atau tidak bertindak. Ini dapat dilakukan, setelah individu menyadari bahwa semua nilai kebaikan universal terdapat di dalam Pancasila.

Lalu, tindakan pribadi dan sosial positif yang dimaksud dalam Pendidikan Nilai Pancasila, yakni tindakan manusia merdeka, tindakan pribadi untuk menjadi manusia merdeka, sumber rujukannya adalah sila pertama dan kedua. Tindakan merdeka berarti melakukan tindakan berdasarkan pilihan sadar pribadi dan cerminan dari keimanan, serta menentukan tindakan dengan pertimbangan kebaikan, cara-cara adil dan rasional dalam mengelola diri, yakni semua pilihan tindakan memiliki arah tujuan dan prioritas yang positif.

*Tindakan makhluk sosial*, tindakan pribadi dalam kerangka kemasyarakatan, merujuk pada sila kelima. Misalnya, sebagai makhluk sosial, Pancasila memesankan agar warga Indonesia menjadikan prinsip keadilan sebagai cara utama, serta memiliki mentalitas memberi, melayani, dan bekerja sama. Saat tindakan individu berdasarkan sila kelima, maka individu akan memiliki tindakan komunikasi sosial dengan niat baik, tanggung jawab, sikap luwes dan toleran, serta mengilhami orang lain agar memunculkan potensi terbaiknya.

*Tindakan warga Negara*, tindakan pribadi sebagai warga negara, merujuk pada sila ketiga dan keempat. Menghidupkan nilai Pancasila menciptakan tindakan warga negara yang mengupayakan persatuan dan kesatuan dengan cara bijaksana, yakni dengan berlaku adil atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita yang selalu meminta perbaikan sistem pendidikan dari negara disebut tidak adil dan tidak bijaksana jika kita sendiri tidak melakukannya. Bijaksana dapat muncul dari pola pikir “memperhatikan kepentingan yang lain sehingga ada dalam keselarasan”.

Dengan kata lain, sebagai pribadi, manusia merdeka adalah manusia yang beriman, bersikap adil, dan beradab. Beriman, adil, dan beradab adalah cara sekaligus tujuan untuk menjadi manusia merdeka. Manusia sebagai makhluk sosial, manusia berkarakter Pancasila adalah memberikan perbaikan bagi kehidupan bersama dengan penuh rasa keadilan sosial dan kebijaksanaan. Sebagai warga negara, manusia berkarakter Pancasila berarti dapat mengutamakan persatuan dan kesatuan serta mengupayakan penyelesaian masalah-masalah kebangsaan dengan cara-cara yang menjamin persatuan dan kesatuan.

### **Sasaran Ketiga:**

“Memberi inspirasi bagi setiap individu untuk memilih nilai-nilai Pancasila sebagai nilai personal, sosial, moral, dan spiritualnya sendiri, serta menyadari metode-metode praktis untuk pengembangan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila”

Sasaran ketiga ini menegaskan Prinsip Panduan bahwa dalam pembelajaran PNP, pendidik bertugas “memberi inspirasi” mengenai nilai Pancasila. Cara yang ditawarkan dengan cara mengajukan sejumlah nilai-nilai Pancasila yang dapat dipilih sebagai nilai personal, sosial, moral, dan spiritual peserta didik. Cara kedua pendidik, melalui PNP ini, akan memberikan metode-metode praktis pengembangan nilai Pancasila. Hasil yang diinginkan adalah agar peserta didik dapat mengembangkan dan mendalami nilai Pancasila.

**Pendidik sebagai pemberi inspirasi**, inilah yang diharapkan dari PNP. Sebagai Inspirator pendidik harus memberikan teladan atau memiliki keterampilan narasi tertentu agar pernyataannya menjentikkan api inspirasi siswa. Sebagai Inspirator, pendidik mendorong siswa mengaitkan nilai yang disimpulkan dengan nilai-nilai kehidupan. Selain itu, PNP menyediakan sejumlah metode-metode praktis agar pendidik dapat menghidupkan nilai-nilai Pancasila yang terhubung dengan potensi nilai dalam diri seseorang.

**Memilih nilai-nilai Pancasila sebagai nilai personal, sosial, moral, dan spiritualnya sendiri**, adalah proses sinkronisasi pemahaman dan pengalaman siswa dengan nilai Pancasila. Ada banyak nilai yang dapat disimpulkan dari Pancasila, sejumlah nilai itu disinkronkan dengan nilai personal, atau nilai sosial, moral dan spiritual. Melalui cara ini, semua nilai Pancasila direlasikan dengan seluruh aspek nilai kehidupan.

### Sasaran Keempat:

“Mendorong para pendidik untuk melihat pendidikan nilai Pancasila sebagai penyedia filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, serta memfasilitasi tumbuh kembang dan pilihan tindakan individu sehingga mampu berintegrasi dalam masyarakat dengan rasa saling menghargai, percaya diri, dan memiliki arah tujuan sebagai warganegara Indonesia”

Sasaran keempat ini memberikan prinsip panduan bahwa PNP ini hanya “mendorong pendidik” bukan “memaksa”. Ini berarti kreativitas pendidik dihargai, bahkan dipicu untuk berkembang. Apa yang ada dalam PNP adalah inspirasi dan dorongan agar pendidik dapat mengembangkan cara menghidupkan nilai. Cara menghidupkan nilai dalam PNP tergantung pada “cara memandang nilai Pancasila” dan cara memfasilitasi tumbuh kembang dan pilihan tindakan siswa.

PNP meyakini bahwa nilai Pancasila merupakan sumber filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, karena itu semua aspek nilai kehidupan harus dikaitkan dengan Pancasila. Setelah mengaitkan semua nilai dengan Pancasila, pendidik diharapkan dapat memfasilitasi tumbuh kembang dan pilihan individu dalam berperilaku di tengah masyarakat. Hasil yang diinginkan dari sasaran keempat ini adalah agar “siswa dapat berintegrasi dalam masyarakat dengan rasa saling menghargai, percaya diri, dan memiliki arah tujuan sebagai warga Negara Indonesia”.

**Penyedia filosofi kehidupan:** Pendidikan Nilai Pancasila menyadarkan kita bahwa setiap orang telah memiliki nilai-nilai. Semua nilai yang dimiliki orang per orang atau masyarakat bahkan ideologi tertentu terhubung dengan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, dapat berlaku sebaliknya, bahwa semua nilai tersedia dalam Pancasila. Untuk itulah Pancasila dapat dipahami sebagai penyedia filosofi kehidupan. Untuk hidup beragama merujuk pada nilai dari sila pertama, untuk bertindak atas dasar kemanusiaan merujuk pada sila kedua, untuk panduan sebagai warga Negara Indonesia merujuk pada sila ketiga, demokrasi merujuk pada sila keempat, dan agar hidup dapat berpihak pada kesejahteraan bersama merujuk pada sila kelima. Pendek kata, semua nilai universal dapat ditemukan dalam nilai Pancasila.

**Memfasilitasi tumbuh kembang.** Peserta didik adalah individu manusia yang sedang mengalami perkembangan menuju kematangan jiwa. Kejiwaan peserta didik masih labil dan akan memiliki kebiasaan tertentu tergantung pada lingkungan pembentuknya. Sekolah dan pendidik memiliki peran penting dalam orientasi perkembangan siswa ini, namun sekolah dan pendidik tak bisa “mencetak” siswa menjadi ini atau itu. Sekolah dan pendidik hanya memfasilitasi pertumbuhan siswa, karena bagaimanapun arah pertumbuhannya selagi merujuk pada nilai Pancasila akan menjadi pribadi yang baik.

**Mampu berintegrasi dalam masyarakat: rasa saling menghargai, percaya diri, dan memiliki arah tujuan.** Orientasi utama dari pertumbuhan kejiwaan individu adalah agar individu dapat berintegrasi dalam masyarakat. Generasi muda sebagai penerima manfaat terbesar Pendidikan Nilai Pancasila dalam proses pembelajaran mereka, didorong untuk dapat terlibat dalam masyarakat, tidak sekedar ada di sana melainkan aktif berperan dalam menyemai benih nilai Pancasila. Untuk bisa berperan aktif itu, generasi muda harus memiliki sikap saling menghargai (toleransi) di tengah kenyataan kemajemukan masyarakat Indonesia, percaya diri akan nilai dirinya, dan memiliki arah tujuan yang jelas dalam proses pertumbuhan kematangan jiwanya.

Pendidik melalui PNP ini memfasilitasi siswa agar memiliki percaya diri dengan nilai Pancasila, sebab Nilai Pancasila sangat berkaitan dengan potensi-potensi keterampilan hidup (*lifeskill*). Serta untuk memiliki arah tujuan sebagai warga Negara Indonesia, karena Pendidikan Nilai Pancasila membantu seseorang untuk merefleksi pengalaman dan perasaannya hingga menghasilkan pemahaman dan keyakinan pada arah tujuan hidup berbangsa dan bernegara yang didasari pijakan nilai-nilai, kita sebut pilihan tindakan sadar sosial.

Keempat sasaran PNP merupakan orientasi Pendidikan Nilai yang dapat digunakan semua orang dalam mentransformasi Pancasila dalam kehidupan. memberikan kepercayaan pada setiap individu untuk mengembangkan nilai dirinya. Pendidikan Nilai Pancasila adalah panduan dan metode praktis yang disediakan agar setiap orang meyakini dirinya sebagai pendidik yang mampu memfasilitasi diri sendiri dan mampu hidup bersama orang lain (*to live together*), khususnya dalam pergaulan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setiap orang dapat memberikan “stimulus nilai”, yakni rangsangan yang memancing setiap orang untuk memikirkan, menghayati, mengolah, kemudian melahirkan nilai dalam diri yang selama ini masih bersifat potensi.

Keempat sasaran PNP ini mendorong transformasi cara pendidik memandang dirinya. Tugas guru bukan mendikte nilai melainkan: (1) Membantu siswa memikirkan, merefleksikan, dan sekaligus menerapkan nilai-nilai Pancasila, (2) Memperdalam pemahaman nilai-nilai Pancasila agar menjadi motivasi tindakan dan agar individu bertanggungjawab untuk menerapkan dan menyebarkan nilai Pancasila; (3) Memberi inspirasi; (4) Fasilitator tumbuh kembang pendewasaan siswa. Melalui keempat peran tersebut, Pendidikan Nilai Pancasila dilakukan dengan:

1. Membantu setiap individu agar memikirkan dan merefleksikan, sekaligus menerapkan nilai-nilai dari Pancasila,
2. Memperdalam pemahaman, motivasi dan tanggungjawab praksis dari nilai Pancasila,
3. Memberi inspirasi bagi setiap individu untuk memilih nilai-nilai positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Ruang Lingkup PNP di Lembaga Pendidikan**

Pendidikan Nilai Pancasila (PNP) bertujuan memberdayakan peserta didik dan mempromosikan partisipasi aktif dari komunitas sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam semua bidang kehidupan sekolah, yakni menempatkan Pancasila di jantung-pengalaman pembelajaran di sekolah, sebagai bagian integral dari kehidupan keseharian sekolah melalui pendekatan Pendidikan Nilai Pancasila. Ada 4 bidang utama di sekolah yang menjadi ruang lingkup PNP, yaitu:<sup>33</sup>

1. *School Governance*: Pengambilan kebijakan di sekolah.
2. *Relationship*: Perlakuan sesama anggota sekolah.
3. *Curriculum and Extra-Curriculum Activities*: Kurikulum dan kegiatan ekstra kurikuler.
4. *School Environment*: Lingkungan fisik sekolah, termasuk aksesibilitas fisik.

---

<sup>33</sup> Diadaptasi dari *The Four Key Areas of School Life, Human Rights Education*. Lihat Amnesty International. *Becoming a Human Rights Friendly School: A Guide for School Around The World* (London: Amnesty International Ltd - Peter Benenson House, 2012), 24.

PNP membangun lingkungan inklusif dengan latar keragaman budaya, di mana semua orang didorong untuk mengambil bagian aktif dalam kehidupan sekolah, tanpa memandang status atau peran. Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki tugas yang sama, yakni belajar tentang nilai Pancasila dan mempraktikkannya setiap hari melalui pendekatan integral. Pendidik dan tenaga kependidikan, juga siswa, kemudian diharapkan dapat menjadi katalisator perubahan di komunitas yang lebih luas. Setiap orang diharapkan mengalami perubahan cara berpikir tentang Pancasila dan secara aktif berpartisipasi untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila dan peduli terhadap masalah-masalah bangsa.

Hal ini didasarkan keyakinan bahwa Budaya Pancasila sangat mungkin dilakukan dengan peningkatan pengetahuan diiringi dengan perubahan perilaku dan sikap di seluruh komunitas sekolah. Melalui cara ini PNP diharapkan mampu memberikan perubahan seperti:

1. Memberdayakan kaum muda dan mempromosikan partisipasi aktif semua anggota komunitas sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam semua bidang pembelajaran..
2. Memungkinkan kaum muda untuk memahami Pancasila sebagai ekspresi dirinya dan terinspirasi, serta bertanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila terhadap masalah-masalah bangsa Indonesia.

Implementasi Pendidikan Nilai Pancasila menjangkau empat bidang utama kehidupan sekolah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Governance:** Sekolah bekerja untuk membuat struktur organisasi dan kebijakan yang sepenuhnya demokratis dan partisipatif, mendorong anggota komunitas sekolah untuk berpartisipasi dengan bebas, aktif dan penuh makna dalam kehidupan sekolah. Hal ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, dari mendorong suara siswa untuk didengar dalam dewan sekolah, membentuk badan perwakilan siswa, dan memperkuat asosiasi orang tua.

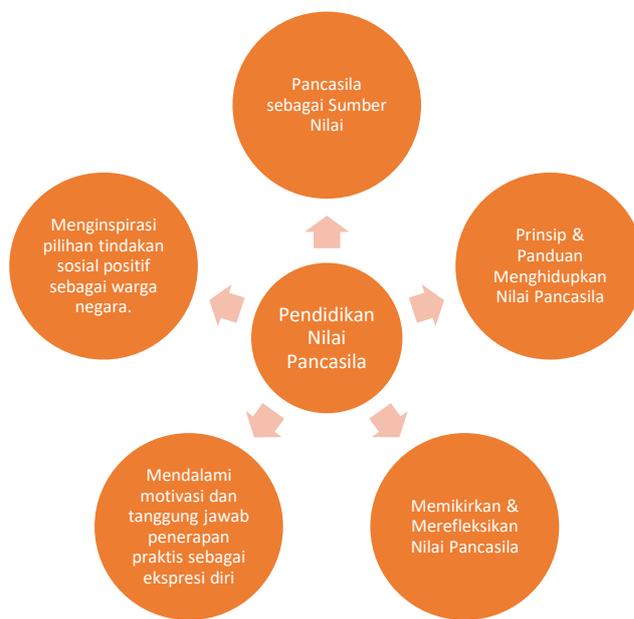
**Relationship:** Meningkatkan perilaku interaksi sosial yang lebih baik di sekolah. Mempromosikan suasana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kesetaraan, nondiskriminasi, inklusi, saling menghormati harga diri dan martabat setiap individu di seluruh komunitas sekolah secara utuh.

**Kurikulum dan Aktivitas ekstra kurikulum** - pengajaran Pancasila dan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dalam kurikulum atau kelompok bakat minat dalam kegiatan ekstra kurikuler. Para pendidik dilatih tentang pendidikan nilai-nilai Pancasila dan metodologinya agar secara efektif mampu menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pembelajaran siswa. Lingkungan Sekolah - Lingkungan tempat pembelajaran: Belajar tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila sangat efektif dilakukan dalam suasana berbasis nilai, di mana setiap individu merasa disayangi (*loved*), dipahami (*understood*), bernilai (*valued*), dihargai (*respected*), dan dilindungi (*safe*). Suasana ini sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, sehingga nilai-nilai Pancasila mampu menciptakan individu yang bermartabat, berjiwa nasionalisme, dan mampu menjangkau lingkungan yang lebih luas dengan penuh nilai-nilai. Secara fisik, bisa ditransformasikan ke tempat-tempat di mana setiap orang bisa mengekspresikan diri sebagai bentuk reflektif dari Pancasila, seperti taman atau ruang diskusi. Selain itu, bisa dilakukan dengan memberikan nama sesuai dengan tema-tema Pancasila di ruang atau bangunan di sekolah.

Akhirnya, saya membayangkan PNP dapat menjadi sarana atau metode mengembangkan manusia Indonesia yang Pancasila-lais. Semoga. [ ] [ ] [ ]

**Dr Budhy Munawar-Rachman**, Dosen Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara.

**Lampiran: Bagan Tujuan dan Sasaran Pendidikan Nilai Pancasila**



**Refleksi Nilai Pancasila**

*Memang tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, Ibu Indonesia, adalah mengharap dari semua putera-putera dan puteri-puterinya pengabdian yang demikian itu, penyerahan jiwa-raga yang tiada batas, pengorbanan diri walau yang sepahit-pahitnya pun kalau perlu, dengan hati yang suci dan hati yang ikhlas. Putera-putera dan puteri-puteri Indonesia haruslah merasa sayang, bahwa mereka, untuk pengabdian ini, masing-masing hanya bisa menyerahkan satu badan saja, satu roh saja, satu nyawa saja dan tidak lebih - Soekarno dalam Indonesia Menggugat.*